



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah diubah dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKTERARIS DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
1	Kewajiban Pembangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 1
2	Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 2
3	RDTR	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 4
4	Prasarana Minimal	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 1
5	Perubahan atas Pergrup No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 3 (menunggu pengesahan RPP UUCK)
6	Perubahan Atas Pergrup No. 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan			V		Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
7	Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 4
8	Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 4
9	Perubahan Atas Pergub No. 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3
10	Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah	BPAD				V	1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41	TW 1

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
11	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	BPAD				V	<p>3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016</p> <p>4. Saran/Masukan dari TGUPP untuk penyempurnaan</p> <p>1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p> <p>3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah</p> <p>4. Saran/Masukan dari TGUPP untuk penyempurnaan</p>	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
12	Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPAD	V				<p>1. TL Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/028-LHP/IJ tanggal 31 Januari 2020 tentang hal LHP atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Tahap II</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p>	TW 1
13	Pedoman Pemberian BBM	BPAD				V	<p>1. Penyesuaian Kebutuhan perangkat Daerah</p>	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPAD	V				<p>2. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian BBM Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat, Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2010 tentang Pemberian BBM dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai</p>	TW 2
15	Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	BPAD				V	<p>1. Revisi Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik / Dikuasai Pemerintah Prov. DKI Jakarta</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p>	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
16	Pedoman Penetapan Status Penggunaan BMD	BPAD				V	1. Revisi Keputusan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Pengadaan/ Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Asset Tetap SKPD/UKPD	TW 3
17	Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	BPAD	V				2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41 Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41	TW 4
18	Kemitraan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	V				Menindaklanjuti Perda Provinsi DKI Jakarta No.2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, Pada Pasal 42 ayat 10 dan Pasal 55 ayat 9 diamanatkan agar dibenuk Pergub yang mengatur tentang pelaksanaan pola kemitraan	TW4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
						<p>a. Bahwa dalam upaya memperkuat dan memantapkan ekonomi daerah, khusus pada bidang usaha perpasaran diperlukan adanya pemberdayaan dan kemitraan usaha yang kokoh antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM/IKM</p> <p>b. Bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan UMKM/IKM melalui Kemitraan Usaha</p>		

NO	JUJUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
19	Kawasan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	V				Bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan melalui penyelenggaraan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara lebih optimal, profesional dan berkesinambungan serta dapat terintegrasi dengan kepariwisataan	TW4
20	Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			V		Revisi Pergub No. 10 Tahun 2015 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini	TW 4

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
21	Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Pembuatan Sebelum Tahun 2021	Badan Pendapatan Daerah	V				Delegasi kewenangan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2021	TW 1
22	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah			V		KSD	TW 1
23	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik	Badan Pendapatan Daerah			V		KSD	TW 1
24	Penerbitan dan Penyempitan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik	Badan Pendapatan Daerah	V				KSD	TW 2
25	Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional	Badan Pendapatan Daerah			V		Amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
26	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI / Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan PNS	Badan Pendapatan Daerah			V		Amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	TW 2
27	Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)	Badan Pendapatan Daerah	V				Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	TW2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
28	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan NJOP Sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)	Badan Pendapatan Daerah			V		Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	TW 2
29	Penetapan NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021	Badan Pendapatan Daerah	V				Amnat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan	TW 1
30	Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun 2021	Badan Pendapatan Daerah	V				Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	TW 1
31	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur	Badan Pendapatan Daerah			V		Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
32	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum	Badan Pendapatan Daerah			V		Amanat Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019	TW 1
33	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah			V		Amanat Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019	TW 2
34	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah			V		Rekomendasi Inspektorat	TW 2
35	Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah			V		Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Untuk Keperluan Laporan Korsugah KPK	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT			
36	Pemotongan Hewan Kurban	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	V					Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
37	Pengembangan Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	V					Tindak Lanjut Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018- 2030	TW3
38	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan harga murah untuk masyarakat tertentu	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			V			Terjadi perubahan komoditas dan kelompok penerima manfaat	TW 2
39	Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi	Dinas Kebudayaan	V					Amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi	TW 1
40	Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Dinas Kebudayaan	V					Amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	TW 1
41	Perubahan Atas Pergub Nomor 45 Tahun 2018 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia	Dinas Sosial		V				Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia Daerah	TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMERAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
42	Perubahan Atas Pergub Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak	Dinas Sosial			V		Permensos Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak	TW 1
43	Layanan Lanjut Usia	Dinas Sosial	V				Permensos Nomor 9 Thun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota	TW 4
44	Layanan Anak	Dinas Sosial	V				Permensos Nomor 9 Thun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota	TW 4
45	Tim PIPA	Dinas Sosial	V				Pergub DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak	TW 2
46	Karang Taruna	Dinas Sosial			V		Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna	TW 1

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
47	SDM Kesos	Dinas Sosial	V				Permensos Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	TW 3
48	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, emberian Kuasa dan Penunjukkan Pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)			V		Kebutuhan untuk percepatan pelayanan administrasi kepegawaian	TW 1
49	Tata cara pengusulan pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali PNS dari dan dalam jabatan fungsional	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	V				Tertib Administrasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	TW 1
50	Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintahan Prov DKI Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	V				Tindak Lanjut dari hasil validasi dan persetujuan KEMENPAN RB atas standar kompetensi teknis jabatan pimpinan Tinggi	TW 2
51	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/ Penangguhan Cuti PNS	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)			V		Penyesuaian terhadap perubahan ketentuan mengenai cuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMERAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
52	Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS dan CPNS	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 2
53	Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS dan CPNS	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 2
54	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Biro ORB		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3
55	Jam Kerja dan Kehadiran PNS	Biro ORB		V			Penegakkan disiplin dan peningkatan profesionalitas dan kinerja PNS	TW 3
56	Tata Cara Pengisian Pejabat Pelaksana	Biro ORB		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 4
57	Mutasi Pegawai	Biro ORB		V			Tertib Administrasi dalam pengelolaan mutasi pegawai	TW 4
58	Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov DKI Jakarta	Biro ORB		V			Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Penda	TW 1
59	Pedoman Ruang dan Sarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Prov DKI Jakarta	Biro ORB		V			Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PEMDA	TW 1
60	Tata Naskah Dinas	Biro ORB		V			Penyesuaian dengan NDE	TW 1

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
61	Perubahan Atas Pergub Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik	Biro ORB			V		Perubahan alur kerja NDE	TW 2
62	Peraturan Gubernur tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	Biro ORB			V		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara an Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	Target Selesai B03
63	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan	Biro ORB		V			Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020	TW 1
64	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Biro ORB		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
65	Organisasi dan Tata Kerja Dimas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Biro ORB		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
66	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	Biro ORB		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 2
67	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Biro ORB		V			Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	V

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/AIASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
68	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	V

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
69	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
70	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
71	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakti Umum Daerah	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
72	Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPALIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
73	Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPALIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
74	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
75	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
76	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Biro ORB		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	TW 4
77	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	Biro ORB		V		<p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	TW 4	

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
78	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Biro ORB		V			Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	TW 4
79	Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan	Biro ORB		V			Formasi Jabatan Fungsional khususnya ariparis dan pustakawan belum sesuai dengan perhitungan dari instansi pembina	TW 1
80	Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi terkait ketenagalistrikan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	TW 1
81	Formasi Jabatan Fungsional	Biro ORB		V			Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 1

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
82	Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Sosial	Biro ORB		V			Formasi Jabatan Fungsional khususnya arsiparis dan pustakawan belum sesuai dengan perhitungan dari instansi pembina	TW 1
83	Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi tersebut pada Sekretariat DPRD	TW 1
84	Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi tersebut ada biro hukum	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
85	Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi belum dibentuk di Pemprov DKI , selain itu untuk mendukung kinerja bidang jasa konstruksi yang akan dibentuk, dikarenakan pembentukan bidang jasa konstruksi juga sudah di amanatkan di permendagri	TW 1
86	Formasi Jabatan Fungsional Sandiman	Biro ORB	V				Formasi jabatan fungsional sandiman dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sandi yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
87	Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Biro ORB	V				Formulir Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis terkait pengujian barang dan bahan teknik serta pengujian kerajinan dan terkait tekstil yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Menengah	TW 1
88	Formasi Jabatan Fungsional	Biro ORB		V			Dikarenakan terdapat jabatan fungsional baru yang dibutuhkan di lingkungan dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi yakni penguji K3, JF dimaksud dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi UPT Pusat Hyperkes dan KK	TW 1

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
89	Peraturan Gubernur tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Biro ORB			V		Adanya perpindahan rumputn jabatan pelaksana Kepala Satpol PP Kelurahan yang sebelumnya berada di Teknis Ahli beralih menjadi rumputn Kepala Satuan Pelaksana	TW 3
90	Formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang / bagian hukum yang ada pada tingkat walikota an Sekretariat DPRD	TW 4
91	Peraturan Gubernur tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Biro ORB			V		Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
92	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Biro ORB			V		Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
93	Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaaiswara	Biro ORB		V			Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
94	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Biro ORB			V		Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
95	Formasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah dan Pusat	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Analis keuangan Pusat dan Daerah dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan dan anggaran yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	TW 4

NO	JUJUDL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
96	Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Biro ORB		V			Dikarenakan Permenpan lama terkait Pamong Budaya telah dicabut dan diganti yang baru dengan Permenpan No.7 Tahun 2020, selain itu adanya pemecahanan perangkat daerah daru Disparbud menjadi Dinas Kebudayaan dan Disparekraf	TW 4
97	Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup	Biro ORB		V			Dikarenakan Permenan lama terkait Pengendali Dampak Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti yang baru dengan Permenpan No. 30 Tahun 2019, selain itu adanya Jabatan Fungsional baru yakni Penyuluh Lingkungan Hidup	TW 4

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
98	Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Biro ORB	V				Formasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan kebakaran dan penanggulangan bencana yang ada pada dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	TW 4
99	Persyaratan Teknis Sarana Penyelamatan Jiwa	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				1 Untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (8) Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 2. Sebagai dasar hukum untuk standar sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung	TW 1
100	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				Sebagai dasar hukum untuk mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPPD PEMERAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
101	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Peanggulangan Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			V		TW 3	
102	Peningkatan Keselamatan Kebakaran Gedung Pemerintah Daerah	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				TW 1	
103	Organisasi dan Tata Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V		1. Menyesuaikan kebutuhan organisasi serta regulasi Peraturan saat ini, antara lain permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi Kelembagaan Biro ORB Tahun 2019	TW 3	

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
104	Alat Pelindung Diri dan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri aam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah Permenakertrans Nomor Per 08/Men/V/2010 tentang Alat Pelindung Diri SNI ISO 11999-1:2015 tentang APD Untuk Petugas Pemadam Kebakaran 	TW 2
105	Pakaian Dinas dan Kelengkapan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				Peraturan Menteri Daam Negari Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bagis Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	TW 2
106	Mekanisme Pengelolaan APAR untuk masyarakat dan pengelolaan proteksi kebakaran lingkungan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				Rujukan Kepmendagri Nomor 364.1-206 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Kebakaran	TW 4

NO	JUJUDL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMERAKARSA	JENIS RANPERGUB					DASAR /ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT			
107	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi di Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)		V			Penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang TSLDU karena adanya temuan BPK	TW 2	
108	Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Pasal 342 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	TW 3	
109	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 2	
110	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 3	
111	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 3	
112	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Implementasi Amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI)	TW 3	
113	Transformasi BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 3	
114	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMD/ PT Patungan	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				TLHP BPK	TW 2	
115	Perubahan Atas Pergub Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penguasaan Kepada PT Jakarta Proptindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan sampah antara di dalam kota	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3	

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
116	Perubahan Atas Pergub Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Proptertindo (Perseroda) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
117	Perubahan Atas Pergub Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Proptertindo (Perseroda) Dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
118	Organ BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 4
119	Anak Perusahaan BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 4
120	Penugasan kepada PT. Jakarta Tourisindo untuk penyelenggaraan dan pengelolaan aktivitas ruang publik, pusat informasi wisata dan produk kreatif	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
121	organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah pasar jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		V			Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 1
122	organisasi dan tata kerja perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		V			Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 1

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPPD PEMERAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALIASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
123	Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan		V			Menyesuaikan dengan Permendikbud terbaru	TW 1
124	Bantuan Peningkatan Mutu Sekolah Swasta	Dinas Pendidikan	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
125	Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Kesiapan Bersekolah SD	Dinas Pendidikan	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
126	Pendidikan Inklusif	Dinas Pendidikan	V				Menyesuaikan Peraturan diatasnya (UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)	TW 1
127	Pembinaan Prestasi Berkelanjutan	Dinas Pendidikan	V				Dinas Pendidikan belum memiliki dasar hukum dalam program pembinaan Prestasi berkelanjutan	TW 1
128	Sistem Informasi Penunjuk Arah (wayfinding)	Dinas Perhubungan	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
129	Perubahan Atas Pergub 265/2015 Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Jakarta	Dinas Perhubungan			V		Pergub 265/2015 perlu dilakukan penyempurnaan	TW 4
130	Penyelenggaraan Jjin Usaha Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	V				1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan	TW 4

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMERAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
131	Penyelenggaraan Jjin Usaha Angkutan Laut Dalam Provinsi (SIUPAL dalam Provinsi)	Dinas Perhubungan	V				<p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Depo Peti Kemas</p>	TW 4
132	Penyelenggaraan Jjin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPELRA)	Dinas Perhubungan	V				<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan</p> <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Angkutan Laut</p>	TW 4

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
133	Penyelenggaraan Jjin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal	Dinas Perhubungan	V				<p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan</p>	TW 4
134	Dewan Pengawas Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Dinas Perhubungan	V				<p>Persiapan Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik, dalam hal pemenuhan persyaratan organisasi dengan PPK BLUD</p>	TW 4
135	Pedoman Pemberian Remunerasi Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Dinas Perhubungan	V				<p>Persiapan Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik, dalam hal pemenuhan persyaratan organisasi dengan PPK BLUD dan antisipasi pola penggajian pegawai non PNS yang memiliki kualifikasi/keahlian yang dibutuhkan</p>	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT			
136	Penyelenggaraan Jalan berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan		V			Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik dan pengganti Pergub 25/2017	TW 4	
137	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh	Dinas Perhubungan		V			Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, dalam hal pertimbangan beban kerja organisasi dalam skala operasional/Pengganti Pergub 337 Tahun 2016	TW 4	
138	Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan	V				Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, terkait besaran tarif yang akan diterapkan di sisi masyarakat pengguna jalan berbayar elektronik berikut mekanisme pemungutan	TW 4	
139	Standar Pelayanan Minimal Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan		V			Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, dalam hal pemenuhan standar layanan yang harus diselenggarakan bagi masyarakat pengguna jalan berbayar elektronik/ pengganti Pergub 223 Tahun 2015	TW 4	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
140	Jak Lingko	Dinas Perhubungan	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
141	Tarif bundling	Dinas Perhubungan	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
142	Perubahan Atas Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang bersumber dari APBD kepada PT. Transportasi Jakarta	Dinas Perhubungan			V		Penyempurnaan Substansi	TW 2
143	Perubahan Atas Pergub Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapi Transit	Dinas Perhubungan			V		Perpanjangan Kontrak Transjakarta	TW 3
144	Tarif transjakarta	Dinas Perhubungan			V		Harga tarif tidak relevan saat ini	TW 3
145	Penyelenggaraan Alat Mobilitas Personal	Dinas Perhubungan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 2
146	Sepeda Sewa	Dinas Perhubungan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
147	Tiket Elektronik AKAP	Dinas Perhubungan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
148	Alat Angkut Umum Kayu	Dinas Perhubungan	V					TW 3
149	Standar Pelayanan Minimal Terminal	Dinas Perhubungan	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
150	Penyelenggaraan Sistem Tiket Elektronik Online Berbasis Aplikasi Jacket Bus sebagai bagian dari Layanan Terminal Antar Kota Antar Provinsi di Jakarta	Dinas Perhubungan	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
151	Perubahan Atas Pergub tentang Subsidi MRT dan LRT	Dinas Perhubungan			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
152	Percepatan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		V				TW 4
153	Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 1
154	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Forum Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			V		Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 1
155	Penyediaan dan pemanfaatan taman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	V					TW 1
156	Pengelolaan dan Perlindungan Pohon	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	V					TW 1
157	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	V					TW 1
158	Pemakaman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	V					TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
159	Klasifikasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip				V	Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Klasifikasi, karena sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah	TW 4
160	Tata Cara Penyusunan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perpustakaan dan Arsip				V	Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah	TW4
161	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Arsip	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3 dan TW 4
162	Alih Media dan Digitalisasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3 dan TW 4
163	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	V				Kegiatan Strategis Daerah 2021	TW 2
164	Visi Pariwisata Urban DKI Jakarta	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	V				Kegiatan Strategis Daerah 2021	TW 4
165	Insentif Penyelenggaraan MICE	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	V				Amanat Bab IX Perubahan RPJMD 2017-2022 (Ranbir)	TW 4

NO	JUJUDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
166	Pengembangan Pariwisata Halal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	V				Berdasarkan peringkat negara dengan pariwisata halal terbesar pada IMTI tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama. Jakarta masih berada di peringkat ke empat setelah Lombok, Aceh dan Kepulauan Riau.	TW 4
167	Festival Sepanjang Tahun	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		V			Kegiatan Strategis Daerah 2020	TW 3
168	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
169	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
170	Revisi Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
171	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 Tentang Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3

NO	JUJUDL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT			
172	Pengurangan dan Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	V					KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	TW 1
173	Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	V					Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	TW 2
174	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Lingkungan Hidup		V				KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	TW 2
175	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	V					KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	TW 4
176	Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah pada Usaha dan/ atau Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	V					KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	Perbal di Biro Hukum sejak 22 Januari 2021
177	Pemberian Insektif Fiskal Daerah kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah Melaksanakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	V					Amanat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat	Perbal di Biro Hukum sejak 28 Januari 2021
178	Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	V					KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	Perbal berada di Pak Gubernur per tanggal 26 Februari 2021

NO	JUDDUL RANPERGUB	NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
179	kolaborasi pengurangan sampah oleh produsen	Dinas Lingkungan Hidup	V				Ranpergub Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	Sudah masuk ke biro hukum, dikembalikan ke Dinas LH pada tanggal 28 Januari 2021 untuk diperbaiki
180	Penetapan Baku Mutu Dan Pengendalian Terhadap Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup		V			KSD 71, baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 670 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi DKI Jakarta saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang sebenarnya, sehingga perlu menetapkan kembali Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
181	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup			V		Pergub Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	TW 3

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

MARJILAH MATALI

NIP.196511271996031003

